

Analisis Pemikiran Ekonomi Islam Dalam Meningkatkan Kerakyatan Dan Kesejahteraan Masyarakat

Analysis of Islamic Economic Thought in Improving People's Economy and Community Welfare

Jeroh Miko^{a,1}, Riswan Rambe^{b,2}, Nirma Sari Harahap^{c,3}

^{a,b}Dosen Tetap Universitas Potensi Utama Medan; Jl. Kl Yos Sudarso, (061) 6640525

^c Mahasiswa Universitas Potensi Utama Medan; Jl. Kl Yos Sudarso, (061) 6640525

jerohmiko70@yahoo.com¹, riswanrambe93@gmail.com², nirmasarichan@gmail.com³

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkonseptualisasikan ide kerangka ekonomi syariah, ekonomi kewarganegaraan dan ekonomi rakyat demi kemaslahatan bangsa dan negara melalui sistem ekonomi Islam, sehingga merangsang refleksi terhadap dua sistem utama ekonomi, karena aturan ekonomi syariah bersumber dari Qur'an dan Sunnah. Negara Indonesia memiliki kesatuan ekonomi nasional berlandaskan nilai Pancasila dan UUD 1945 berlandaskan nilai-nilai keramat. Dengan menggunakan pendekatan penelitian bibliografi, penelitian ini pertama-tama menyajikan gagasan dasar ekonomi Islam berdasarkan tauhid, ukhuwah, kerja, harta dan pemerataan. Prinsip ekonomi pancasila meliputi ekonomi, kemasyarakatan, etika, pemerataan sosial, semangat kebangsaan dan tolong-menolong. Prinsip ekonomi nasional/kerakyatan adalah perencanaan ekonomi menurut asas kekeluargaan, dimana kelangsungan hidup manusia dimiliki sebuah negara dan semua kekayaan dikuasai oleh negara dan untuk melayani kesejahteraan rakyat. Kedua, kesamaan. Ketiga menjelaskan tentang etika, moralitas, kesetaraan, nilai kebangsaan, lembaga mikro dan desentralisasi

Kata Kunci : Ekonomi Islam, Ekonomi Kerakyatan dan Kesejahteraan Masyarakat

ABSTRACT

The purpose of this study is to conceptualize the idea of an Islamic economic framework, citizenship economy and people's economy for the benefit of the nation and state through the Islamic economic system, thus stimulating reflection on the two main economic systems, because Islamic economic rules originate from the Qur'an and Sunnah. The State of Indonesia has a national economic unity based on Pancasila values and the 1945 Constitution based on sacred values. Using a bibliographic research approach, this study first presents the basic ideas of Islamic economics based on monotheism, ukhuwah, work, wealth and equity. Pancasila economic principles include economics, society, ethics, social equity, national spirit and mutual help. The principle of the national/populist economy is economic planning according to the principle of kinship, in which the continuity of human life is owned by a state and all wealth is controlled by the state and to serve the welfare of the people. Second, similarities. The third explains about ethics, morality, equality, national values, micro institutions and decentralization.

Keywords : Islamic Economics, People's Economy and Community Welfare

Info Artikel :

Disubmit: 03 Mei 2021

Direview: 10 Juni 2021

Diterima: 07 Juli 2021

Copyright © 2021 – AL-QASD Journal. All rights reserved.

1. PENDAHULUAN

Ekonomi kerakyatan adalah suatu sistem ekonomi yg mengarahpada sistem ekonomi kemasyarakatan. Ekonomi kerakyatan berkaitan menggunakan adanya produksi & penyaluran barang kepada masyarakat. Batasan bahasan ekonomi antara lain produksi dan penyaluran barang serta jasa. Dilihat berdasarkan Pandangan lain, manfaat yang kekinian pada kajian ekonomi, yg disandarkan pribadi menggunakan aktivitas insan pada global ekonomi, misalnya (1) konsumsi, (2) produksi, (3) pergantian aktivitas pasar.¹ Hal inilah bisa mempertahankan insan pada memenuhi sandang pangan berupa kebutuhan pokok & loka tinggal. Semuanya berdampak bahwa insan saling berinteraksi.

Perjalanan ekonomi dunia yg pada dasari sang warta-warta betapa akbar imbas berdasarkan2 sistem

misalnya aturan ekonomi kapitalis dan sosialis. Mengenai hal ekonomi, kedua ini terbukti sanggup menaikkan kesejahteraan warga pada negara yg memakai ke 2 sistem ini, misalnya Amerika Serikat & Uni Soviet. Aturan seperti ini menaruh donasi akbar pada bidang pembangunan yg menunjuk pada kemampuan mengoptimalkan asal daya yg ada.

Pertentangan ke 2 sistem ekonomi tadi ditentukan menggunakan ajaran kepercayaan terhadap aktivitas ekonomi menjadi apresiasi berdasarkan insan yg beragama. Secara kaidah bahwa ajaran Islam sanggup menaruh imbas terhadap transaksi ekonomi dalam penerapan sistem ekonomi yang telah ada. Ekonomi Islam sudah menaruh ilham terhadap pemikiran ke 2 sistem ekonomi tersebut, lantaran sistem ekonomi Islam dilandasi al-Quran & al- Hadits. Dalam membahas beberapa kajian mendasar berdasarkan sistem ekonomi menurut opini publik yaitu ekonomi Islam, ekonomi pancasila dan ekonomi kerakyatan, diskursus dan diskursus ekonomi islam, ekonomi pancasila dan ekonomi kerakyatan masih berlangsung.ⁱⁱ

Dalam sistem ekonomi apapun, ia harus mampu menjaga kesejahteraan semua warga negara, menjamin rasa keadilan, kebersamaan, kekeluargaan, keterbukaan, dan memberikan peluang seluas-luasnya kepada setiap pengusaha untuk mengembangkan usahanya, melindungi aktivitasnya. . Masyarakat yang juga menganut asas universalitas, yaitu asas nondiskriminasi berdasarkan etnisitas, keyakinan, ras, dan kepercayaan pada warga negara yang menerapkan prinsip-prinsip Islam. Berdasarkan latar belakang konflik di atas, maka dirumuskan 2 konflik utama yaitu, pertama, apa dasar pemikiran ekonomi Islam, ekonomi pancasila dan ekonomi nasional.

2. METODE

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan aturan yang mendasari ekonomi Islam dan ekonomi sosial tentang kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui kajian literatur. Tahapan penelitian dilakukan dengan mengumpulkan sumber pustaka, baik primer maupun sekunder. Penelitian ini mengklasifikasikan data dengan menggunakan rumus penelitian.ⁱⁱⁱ

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Definisi Ekonomi Islam

Definisi ekonomi Islam berdasarkan pemikir Islam, mengungkapkan menggunakan kata ekonomi syariah merupakan ekonomi yg bersumber dalam kitabullah dan kalam rasulnya. Oleh karena itu, metode melihat ekonomi konvensional yg tersebar hingga waktu ini tidak serupa menggunakan metode ekonomi syariah. Pendapat lain, Ekonomi Islam adalah desain ilmiah yang didasarkan pada konsep keseimbangan antara kesejahteraan individu dan kesejahteraan sosial. Akhirnya sampailah pada hal yang sama sama yang merujuk pada Al-Qur'an dan al-Hadits.

Ada batasan yang harus dipatuhi dalam ekonomi syariah, diantaranya: makan tidak dengan harta yg haram, mencari laba namun menggunakan cara menipu, menerima harta menggunakan cara serakah. Menurut pandangan lain, nilai-nilai jaminan sosial Islam mencakup, misalnya, manfaat yang terbukti harus diklaim oleh semua kelompok. Negara berkewajiban membiayai pelayanan sosial dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini menguntungkan masyarakat dengan harapan adanya kebijakan yang koheren tentang distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil dalam konteks stabilitas ekonomi dan alokasi sumber daya.¹

Seperti yang telah diketahui, bahwa sistem ekonomi syariah bertujuan untuk mewujudkan

Ahmad Ifham Shalihin, *buku pintar ekonomi syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2010), h 259¹

kesejahteraan masyarakat berlandaskan nilai Islam,. Oleh karena itu, tujuannya sama dengan penerapan nilai Islam dalam kehidupan masyarakat, yaitu untuk menciptakan kemaslahatan untuk masyarakat dan keseimbangan ekonomi sehingga menimbulkan kebahagiaan untuk semua rakyat. Pada implementasinya, ada 4 tujuan ekonomi Islam utama yang perlu diperhatikan yaitu:

1. Mencapai kemakmuran menurut nilai dan standar Islam.
2. Terbentuknya masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keadilan dan persaudaraan, yang saling terkaiterat.
3. Mencapai distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil dan adil.
4. Mendukung kebebasan individu dalam meningkatkan taraf ekonomi masyarakat dengan nilai islami.

Selain itu, ada beberapa prinsip utama dalam ekonomi islam yang harus dipatuhi oleh semua orang yang menerapkan ekonomi islam. Prinsip ini hanya terdapat pada ekonomi islam tidak pada ekonomi konvensional. Berikut adalah prinsip dasar/utama pada ekonomi Islam:

1. Memberikan hasil zakat kepada golongan asnaf yang berhak mendapatkannya, dengan tujuan agar mereka bisa menghasilkan uang kembali dengan usaha yang produktif, sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat.
2. Stripping dilarang dalam semua transaksi ekonomi. Seperti, bank syariah tidak membebankan bunga atas transaksi karena menurut ekonomi Islam, uang hanya dapat dihasilkan dari aktivitas sektor riil.
3. Buat perdagangan yang menguntungkan dan bagikan hasilnya. Ekonomi Islam sangat adil dan menekankan pembagian keuntungan dan risiko antara nasabah dan bank.
4. Transaksi keuangan hanya berhubungan dengan sektor riil untuk menghindari gelembung keuangan yang sering terjadi pada perekonomian tradisional.
5. Partisipasi sosial adalah untuk kepentingan publik. Hal ini sesuai dengan nilai ekonomi Islam, dimana tujuan sosial dimaksimalkan dengan mengarahkan sebagian sumber daya untuk kebaikan bersama.
6. Transaksi didasarkan atas kerjasama dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Setiap transaksi, terutama perdagangan dan pertukaran, harus mengikuti aturan hukum Islam. ^{iv}

B. Definisi Ekonomi Kerakyatan

Di dalam kajian ekonomi kerakyatan bagian menurut ekonomi pancasila, yg kegiatan ekonomi diarahkan dal am keterlibatan sebagian akbar warga . Ekonomi tadi diharapkan sanggup memecahkan duduk perkara bangsa dengan berbagai ruang lingkup yang terdapat pada ekonomi tersebut. Dalam hal ini, ekonomi kerakyatan mempunyai prinsip-prinsip dasar yg masih ada dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu sebuah sistem perekonomian yg ditujukan buat mewujudkan kedaulatan warga pada bidang ekonomi. Prinsip dasar ini adalah:

1. Perekonomian dibuat menjadi suatu bisnis bersama atas dasar azas kekeluargaan.
2. Negara menguasai industri dan pengelolaan hajat hidup orang banyak. Tanah, air dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan diperuntukkan bagi kesejahteraan rakyat.
3. Peran negara sangat berperan krusial pada sistem ekonomi kerakyatan. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 27 ayat dua & Pasal 34; kiprah negara pada sistem ekonomi kerakyatan diantaranya mencakup 5 hal menjadi berikut:
 - a. Mengembangkan koperasi
 - b. Mengembangkan BUMN
 - c. Pemanfaatan bumi, air, & segala kekayaan bagi kemakmuran rakyat
 - d. Memberikan hak tiap masyarakat negara buat menerima pekerjaan & penghidupan yg layak memperjuangkan fakir miskin & anak terlantar.

C. Ide Dasar Ekonomi Syariah, Ekonomi Pancasila dan Ekonomi Kerakyatan

Kata prinsip ekonomi menyebutkan beberapa hal, yaitu pertama, manusia selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya buat menerima output semaksimal mungkin. Kedua, buat mencapai sebuah output yg semaksimal mungkin, insan bisa memakai alternatif pada memenuhi kebutuhan hidupnya. Sistem ekonomi ini telah banyak diterapkan diberbagai negara menggunakan banyak sekali macamnya. Perbedaan yg menonjol pada sistem ekonomi Islam menggunakan sistem ekonomi yg lainnya terletak dalam sebuah prinsipnya.²

D. Prinsip Dasar Ekonomi Syariah

Adapun prinsip ekonomi syariah yg di dalamnya mengandung kebaikan pada global dan akhirat Yaitu diantaranya:

1) Prinsip Tauhid & Persaudaraan

Landasan utama ini harus digunakan sebagai pedoman bagi manusia dalam hal penggunaan iman kepada Tuhan. Kami percaya pada alam dan segala isinya, bahwa tidak ada yang terjadi dengan sendirinya. Tidak ada yang tanpa kebijaksanaan. Allah SWT yang membangun langit dan bumi beserta isinya. Bahwa segala kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia bersumber dan kembali kepada Allah SWT. Dalam firman Allah SWT yg mengungkapkan ketauhidan pada Surat Al-Ikhlâs ayat 1.

Asas kerjasama, persaudaraan dan tanggung jawab merupakan asas yang dapat membangun ekonomi beradama. Dengan adanya asas persaudaraan mampu meningkatkan ekonomi rakyat. Seperti santunan terhadap fakir miskin, anak yatim dan dhuafa. Saling membantu dan mencintai juga termasuk dalam ajaran Islam. Terdapat dalam alquran surat al hujurat ayat 10.

2) Prinsip Bekerja & Produktivitas

Pandangan ekonomi Islam mengharuskan kita buat bekerja keras, lantaran dalam hakekatnya bekerja adalah sebagian menurut ibadah. Sehingga insan bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Allah menjelaskan pada al-qur'an bahwa bekerja adalah kewajiban seseorang muslim buat mewujudkan kehidupan yg lebih baik & sejahtera baik didunia & kehidupan akhirat. Islam mengajarkan umat muslim buat bekerja sepanjang hidupnya pada sebaik-baiknya. Perintah ini terdapat dalam alqur'an surat at-taubat ayat: 105.

Mengetahui akan yg ghaib & yg nyata, lalu diberitakan-Nya pada engkau apa yg sudah engkau kerjakan. Segala sesuatu yang dikerjakan didunia akan dipertanggung jawabkan nanti diakhirat. Usaha yang paling utama adalah pekerjaan yang dikerjakan dengan tenaga sendiri sehingga bisa menghasilkan output sendiri. Jika nafkah dicari dengan cara yang haram maka itu pekerjaan yang Allah benci. Seperti pada firman Allah SWT dalam surah Ar-Rad ayat 11.

Selanjutnya, prinsip menurut produktivitas bahwa Islam menghendaki supaya seluruh hamba-Nya menyerahkan segala kemampuannya pada mengelola asal daya alam sekitarnya menggunakan cara ketekunan yg diridhoi Allah SWT. Dalam QS. al-Jumu'ah (62) ayat 10.

3) Prinsip Kepemilikan

Dalam ajaran Islam mengungkapkan hak pribadi pada harta seseorang, harta yg didapat haruslah sesuai menggunakan ketentuan Islam. Kepemilikan harta seorang dari kemaslahatan sebagai akibatnya saling menghormati, menghargai dan tidak terdapat kebencian karena kesenjangan antar status sosial yg lain. Ini hanya jujur Allah yg berupa titipan didunia. Dijelaskan pada surah Al-Baqarah ayat 29. Dalam Konsep ekonomi Islam, memiliki nilai kepemilikan yg terletak dalam moral. Kepemilikan mempunyai kemanfaatannya, bukan menguasai secara berlebih, lantaran kepemilikan harta sesungguhnya hanyalah milik Allah SWT.

Tarli Nugraha, "Ekonomi pancasila refleksi setengah tiga decade" paper (Yogyakarta: PSP UGM 2011)²

4) Prinsip Penyaluran yang Merata

Ini adalah prinsip keseimbangan dalam tatanan ekonomi Islam. Makhluq ciptaan Allah SWT. Ia memiliki kesempatan yang sama untuk memiliki, menguasai, dan menghasilkan hasil dari sumber daya yang ia peroleh, karena ia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Allah berfirman dalam Al-Quran, Al-Hud ayat 61. Kesempatan yang sama untuk semua orang tanpa adanya diskriminasi dari siapapun baik berupa kelas, ras, suku atau status sosial. Setiap orang berhak untuk menikmati hidupnya, sehingga hak individu tidak dibatasi oleh kepentingan orang-orang tertentu yang ingin menang sendiri dan memperkaya diri sendiri.

Dalam Islam, setiap orang memiliki kebebasan dalam melakukan segala sesuatu sehingga bisa menikmati hidupnya tentu kebebasan yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dengan melakukan upaya pada pengelolaan asal daya menggunakan baik, nir boleh menciptakan kerusakan sebagai akibatnya merugikan bagi generasi kedepan. Beberapa peranan taktik ekonomi Islam khususnya pada Indonesia pada upaya menjangkau permasalahan-permasalahan yg dihadapi waktu ini guna mengangkat harkat dan prestise masyarakat yg masih berada pada kalangan bawah garis kemiskinan. Salah satu donasi institusi Syariah pada pembangunan pada Indonesia akan mengembangkan aneka macam turunan Syariah, ilmu, system, asal daya insan, komunitas dan lingkungan sekitar.

Kontribusi berbagai ulama, cendekiawan dan tokoh masyarakat dalam penerapan sistem ekonomi Islam yang telah terbukti kebenarannya adalah sebagai berikut:

- 1) Saat memasuki bank, bawa mereka yang menolak bunga bank.
- 2) UKM melalui pembiayaan di bawah naungan BMT
- 3) Meningkatkan sektor zakat melalui program ZISWAF
- 4) Mendorong penerapan hukum Syariah di segala bidang.
- 5) memotivasi semua kalangan agar tertarik terhadap ekonomi syariah
- 6) Membantu proses aktivitas Islamisasi ilmu dan bidang lainnya.

Dengan munculnya lembaga syariah ini, entitas ini menjadi laboratorium biologi yang bisa kita uji berdasarkan penerapannya pada nilai-nilai dan konsep Islam di bidang muamalah dan turunannya. Sistem ekonomi Islam sangat tergantung pada orang-orang itu sendiri yang mengaturnya, masa depan ekonomi Islam juga tergantung pada kita semua, baik pemimpin maupun orang-orangnya, apakah itu bisnis atau jihad fisabilillah, apa yang telah kita lihat dan alami. semua yang buruk akan dihancurkan.

E. Pemikiran Dasar Ekonomi Kerakyatan

Perekonomian nasional adalah sistem ekonomi yang di dalamnya diselenggarakan berbagai kegiatan ekonomi yang diikuti oleh seluruh anggota bangsa dan hasilnya digunakan oleh seluruh anggota bangsa, sedangkan kegiatan ekonomi diselenggarakan di bawah kendali para anggota. dari perekonomian nasional. Rakyat.³

Dalam sila Kelima yang berbunyi: "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang berarti keadilan bagi rakyat dalam segala bidang kehidupan, baik materiil maupun spiritual, rakyat Indonesia berhak mendapatkan perlakuan yang adil di bidang hukum, politik, dan ekonomi. Ekonomi kerakyatan memiliki nilai filosofis yang sinkron dengan UUD (1945) pada Pasal 33. Artinya, Pasal 33 masih menjadi dasar demokrasi ekonomi, produksi dilakukan oleh seluruh anggota bangsa, bukan untuk kepentingan individu.

F. Persamaan & Perbedaan Pemikiran Dasar menurut Ekonomi Islam, Ekonomi Kerakyatan buat Kesejahteraan Masyarakat

Persamaan pemikiran tersebut terdiri dari:

- 1) Pemikiran dasar semua sistem ekonomi baik itu ekonomi Islam, dan ekonomi Kerakyatan mencerminkan etika, kebiasaan & moral.

Revrison Baswir, *Agenda ekonomi kerakyatan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Bekerjasama dengan IDEA, ³ 1997), 4

- 2) Pemikiran dasar sistem ekonomi mewujudkan pemerataan menurut ketimpangan dan kesenjangan sosial yg terjadi dalam warga khususnya pada Indonesia
- 3) Peran dan pelaku ekonomi yaitu produsen, konsumen dan pemerintah mempunyai jiwa semangat menjadi individu atau rakyat negara yg mempunyai ruh nasionalis.
- 4) Sistem seluruh ini mengupayakan ekuilibrium antara perencanaan ekonomi nasional menggunakan desentralisasi & swatantra daerah.
- 5) Semua sistem ekonomi Islam, ekonomi Pancasila & ekonomi Kerakyatan mempunyai tujuan yang sama yakni buat kesejahteraan atau kemakmuran warga atau umat lainnya.

Adapun yang menjadi perbedaannya adalah sebagai berikut:

- 1) Prinsip dasar ekonomi Islam pada etika, kebiasaan & moral bersumber menurut Al-Quran & Al-Hadits.
- 2) Prinsip dasar ekonomi Islam, merupkan sebuah sistem yg mengedepankan kesejahteraan warga sebagai akibatnya bisa mewujudkan negeri yg mengumpulkan kebaikan alam & kebaikan konduite penduduknya. (Baldutun Thayyibatun wa Rabbun Ghafuur).
- 3) Peran pelaku ekonomi menjadi produsen, konsumen, & pemerintah mengedepankan hungan atau tali yg terjalin antara insan menggunakan Allah atau diklaim Hablum Minallah dan Hablum Minannas.

G. Sinkronisasi Ekonomi Islam Dan Ekonomi Pancasila

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa ekonomi Islam merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi menurut Al-Quran dan Al-Hadits sedangkan ekonomi Pancasila bersumber dari ideologi Pancasila. Dalam Islam ekonomi adalah ekonomi yang berlandaskan tauhid, dengan menggunakan segala komponennya, misalnya: Keyakinan, pengabdian, hubungan dengan alam. Al-Qur'an menyebutkan fungsi kekayaan sebagai perantara, bukan sebagai tujuan. Tujuan akhirnya adalah menjadi bentuk ibadah kepada Allah SWT. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dijelaskan bahwa Indonesia merupakan sebuah Negara yg mengakui Ketuhanan Yang Maha Esa, jua mempunyai tujuan memperjuangkan humanisme yg adil & beradab. Ketuhanan pada pancasila menegaskan etikabangsa buat melaksanakan "kehidupan publik-politik menurut nilai-nilai moralitas & budi pekerti luhur yg tinggi. Secara spesifik orientasi sila pertama pancasila adalah asas yg mendasari dalam empat sila selanjutnya. Ekonomi pancasila adalah sistem perekonomian yg dilandaskan terhadap nilai-nilai pancasila. Juga membuahkan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi pijakan primer buat menjalankan sistem perekonomian, misalnya yg terdapat pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

Hal tadi relevan menggunakan tauhid yg sebagai pondasi primer pada menjalankan perekonomian Islam. Terdapat persamaan antara ekonomi Islam menggunakan ekonomi Pancasila yg diantaranya Ekonomi Islam menggunakan ekonomi Pancasila mempunyai kecenderungan:

- 1) Ditinjau menurut visi sosial & moralnya
- 2) Keinginan buat mewujudkan keadilan & pemerataan social
- 3) Nasionalisme ekonomi, menggunakan semangat kekeluargaan, saling menyayangi & tenggang rasa. Jika telah merata terhadap elemen masyarakat, maka akan terwujud sebagai semangat solidaritas sosial sebagai pemerataan social.
- 4) Kooperasi sebagai kekuatan pada berekonomi. Harta pada Islam hanyalah milik Allah, yg digunakan buat kepentingan bersama. Dalam ajaran Islam nir memandang disparitas kemampuan & kesanggupan menghilangkan maksud menurut kerangka keadilan, sebagai akibatnya didirikan baitul maal menjadi keperluan Bersama buat saling membantu buat mencapai kesejahteraan kolektif. Tujuan menurut didirikannya baitul maal ini sama persis menggunakan tujuan didirikannya koperasi.
- 5) Kesamaan pada ekuilibrium untuk melaksanakan kebijakan ekonomi. Harta benda merupakan kepunyaan bersama, akan tetapi, Al-Qur'an menegaskan bahwa mal merupakan milik Allah. Manusia sebagai khalifah atau wakil Tuhan pada muka bumi buat memelihara

buat kepentingan bersama⁴

H. Sinkronisasi Ekonomi Islam Dan Ekonomi Kerakyatan

Untuk melihat titik temu ekonomi Islam dan ekonomi sosial, kita harus melihat tujuan keduanya. Sistem ekonomi Islam memiliki tujuan sebagai berikut: Pertama, kemakmuran ekonomi dalam kerangka adat moral Islam, kedua, membangun masyarakat dengan tatanan sosial yang kokoh berdasarkan keadilan dan persaudaraan universal, ketiga, mencapai distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil dan merata, keempat, menciptakan bentuk-bentuk umum kebebasan individu. di dalam kerangka kesejahteraan.

Sementara itu, tujuan ekonomi kerakyatan dapat dirumuskan menjadi empat tujuan utama: Pertama, terwujudnya keadilan dan keadilan sosial, yaitu mencegah timbulnya dan berkembangnya ketimpangan ekonomi dan sosial. Kedua, semangat nasionalisme ekonomi, di era globalisasi semakin jelas mendesak untuk mewujudkan perekonomian nasional yang kuat, berkelanjutan, dan mandiri. Ketiga, demokrasi ekonomi berlandaskan demokrasi dan kekeluargaan, koperasi dan koperasi, yang mempelajari perilaku ekonomi individu dan kelompok orang. Keempat, kepadanan yg serasi, efisien, dan adil, antara perencanaan nasional menggunakan desentralisasi ekonomi & swatantra yg luas, bebas, & bertanggung jawab, guna menuju perwujudan keadilan sosial bagi semua rakyat Indonesia.

Dalam ajaran mempunyai tujuan buat membangun rakyat menggunakan tatanan sosial yg solid. Dalam tatanan yg solid setiap individu diikat sang persaudaraan & kasih sayang. Tatanan yg solid akan tercapai bila keadilan pada rakyat terpenuhi termasuk keadilan ekonomi. Kesenjangan pendapatan & kekayaan berlangsung pada rakyat tentu bertabrakan menggunakan konsep keadilan ekonomi. Kesenjangan tadi yg akan diatasi ekonomi Islam.

Cara yg ditempuh sang Islam, contohnya menggunakan memperkecil peluang monopoli & pemusatan penguasaan sektor ekonomi yg sangat akbar dalam beberapa pihak tertentu, mengklaim hak & kesempatan seluruh pihak buat aktif pada proses aktivitas ekonomi, guna pemenuhan kebutuhan dasar, & melaksanakan sistem agunan sosial. Keadilan ekonomi diterapkan Islam, selain berlandaskan asas syariah, jua mengakui kebebasan individu pada berusaha wajib sinkron menggunakan bingkai syariah. Bingkai tadi diantaranya kepentingan orang banyak lebih didahulukan menurut dalam kepentingan individu.

Pemerataan keadilan sosial yg sebagai tujuan menurut ekonomi kerakyatan sinkron & sudah teratasi pada tujuan ekonomi Islam. Ketimpangan ekonomi & kesenjangan sosial yg akan diatasi sang ekonomi kerakyatan telah sebagai titik perhatian menurut ekonomi Islam. Demokrasi ekonomi yg memiliki tujuan buat menaruh kesempatan seluas-luasnya kepada rakyat buat sebagai pelaku ekonomi tanpa subordinat dikembangkan pula pada ekonomi Islam. Bahkan Islam pun mengikutserta pemerintah pada sektor yg menyangkut kehidupan insan menggunakan membolehkan pemerintah memegang monopoli dalam sektor tertentu. Upaya ini dilakukan guna memenuhi kebutuhan rakyat terhadap public good bisa terjamin, misalnya air, energi, barang tambang, & hutan. Kesepadanan yg serasi & adil dan swatantra ekonomi yg bertanggung jawab akan sebagai perhatian pada Islam pada kebebasan individu yg bertanggung jawab pada konteks kesejahteraan sosial Bersama.

4. KESIMPULAN

Perekonomian nasional adalah sistem ekonomi yang terkait dengan sistem sosial ekonomi. Perekonomian nasional mengacu pada keberadaan dan distribusi produksi di antara orang-orang. Sektor ekonomi meliputi produksi dan distribusi barang dan jasa. Dasar pemikiran ekonomi Islam terdiri dari tauhid, persaudaraan, kerja, produktivitas, properti, distribusi dan keadilan. Prinsip-prinsip ekonomi

Yudi Latif, *Negara paripurna: Historis, rasionalitas dan aktualitas pancasila*, (Jakarta: PT. Gramedia ⁴ 2015), 110

Pancasila adalah ekonomi, sosial, moral, keadilan sosial, nasionalisme, kerjasama, desentralisasi dan otonomi daerah. Prinsip ekonomi kerakyatan adalah ekonomi yang berdasarkan asas kekeluargaan, kehidupan dikuasai oleh negara, seluruh kekayaan dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kejayaan rakyat.

REFERENSI

- [1] Baswir Revrison, *Agenda Ekonomi Kerakyatan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerjasama menggunakan IDEA, 1997)
- [2] Darmodiharjo Darji, et al., *Santiaji Pancasila: Suatu Tinjauan Filosofis, Historis & Yuridis Konstitusional* (Surabaya: Penerbit Usaha Nasional, 1991).
- [3] Hidayat Mohamad, *An Introduction to The Sharia Economic* (Pengantar Ekonomi Syariah) (Jakarta: Zikrul Hakim, 2010)
- [4] Hanafi Syafiq.M, *Sistem Ekonomi Islam & Kapitalisme* (Relevansi Ajaran Agama dalam Aktivitas Ekonomi) (Yogyakarta: Cakrawala, 2007).
- [5] Nataatmadja Hidajat, *Pemikiran Kearah Ekonomi Humanistik* (Suatu Pengantar Menuju Citra Ekonomi Agamawi) (Yogyakarta: PLP2M, 1984)
- [6] Nugroho Tarli, "Ekonomi Pancasila Refleksi Seteah Tiga Dekade", Paper (Yogyakarta: Pusat Studi Pancasila (PSP) UGM, 2011)
- [7] Ahmad Ilham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT. Gramedia, 2010)
- [8] Kenlies Era Rosalina, Verbena Ayuningsih Purbasari, *Implementasi Sistem Ekonomi Pancasila Dalam Kebijakan Pemerintah Indonesia*, Vol.2 (Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam Indonesia)
- [9] Rizal Sofyan, "Titik Temu & Sinergi Ekonomi Islam & Ekonomi Kerakyatan" *Jurnal AIqtishad*: Vol. III, No. 1, Januari 2011
- [10] Latif Yudi, *Negara Paripurna: Historis, Rasionalitas & Aktualitas Pancasila*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2015)

ⁱ Muhammad Hidayat, *An introduction to the syariah economic* (pengantar ekonomi islam) (Jakarta: Zikrul Hakim, 2010), h9

ⁱⁱ Hidajat Nataat madja, *Pemikiran kearah humanistic* (suatu citra ekonomi agamawi) (Yogyakarta: PLP2M, 1984), h. 8

ⁱⁱⁱ Darmalaksana, W. Cara menulis Proposal Penelitian, Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati, (Bandung 2020), h.3.

^{iv} Syafiq, M.Hanafi, *sitem ekonomi islam dan kapitalisme*, (Yogyakarta: Cakrawala, 2007), h.9